

# **REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM**

## **Telaah Pemikiran M. Umer Chapra**

**Fadllan**

*(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya / fadllanma@gmail.com)*

### **Abstrak:**

Makna “Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi” dalam penelitian ini adalah sebuah upaya rekonseptualisasi atas konsep-konsep ekonomi pembangunan konvensional, struktur dan sistem ekonomi yang dirumuskan oleh Barat melalui kerangka berpikir yang ditawarkan oleh Muhammad Umer Chapra dengan tujuan membangun kembali konsep pembangunan ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga melahirkan sebuah teori baru sebagai konsep pembangunan ekonomi masa depan. Untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, M. Umer Chapra menawarkan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peran komplementer negara yang aktif dalam ekonomi. Untuk merealisasikan itu semua ia menawarkan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh, yaitu: (1) menghidupkan faktor kemanusiaan; (2) mengurangi konsentrasi kekayaan; (3) melakukan restrukturisasi ekonomi; (4) melakukan restrukturisasi keuangan; dan (5) melakukan rencana kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh manusia. Inti dari seluruh tawarannya tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan moral mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

### **Kata Kunci:**

Meningkatkan Pembelajaran PAI. Rekonstruksi, Pembangunan Ekonomi, Chapra

**Abstract:**

*The meaning of “Reconstruction of Economic Growth” in this research is an effort to reconceptualize the economic concepts of conventional development, structure and economic system formulated by West through the mind frame offered by Muhammad Umer Chapra. This mind set has a purpose of reconstructing the economic growth that can make the society prosperous as the Islamic teaching law, so that it can create a new theory as a future economic developmental concept. To build a fairness economic system and to reach the economic goals, M. Umer Chapra offered a reconstruction on some strategic elements. They are filter mechanism which stressed on the moral filter, people’s motivation to put social interests forward, socioeconomical reconstruction, and the country complements’ active role in economy. To make it true, he offered some policies, they are: 1) enlightening the humanity factors; 2) decreasing the property concentration; 3) making the economic reconstruction; 4) making fund reconstruction; 5) making a strategic policy with the society’s welfare as the orientation. The essence of all his offering about economic growth is a balanced development in two sides, economy and moral. Because it is impossible to build a fairness welfare without any moral development.*

**Keywords:**

*Reconstruction, Economic growth, Chapra*

**Pendahuluan**

Di tengah “pergumulan” dua sistem ekonomi dunia (kapitalisme dan sosialisme), persoalan pembangunan ekonomi sendiri belum banyak dibicarakan. Diskursus pembangunan ekonomi mulai ramai diperbincangkan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua (1939-1945) yang dikomandoi oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Harry S. Truman, sekitar tahun 1950-an.<sup>1</sup> Pada saat itu banyak negara-negara mulai membangun perekonomiannya akibat kehancuran pasca perang, tak terkecuali negara-negara baru merdeka. Sehingga, dimulailah pembangunan ekonomi yang selanjutnya identik dan selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pengelolaan Ideologi LSM Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 8.

berkembang yang kemudian populer dengan sebutan negara-negara Dunia Ketiga.<sup>2</sup>

Untuk menyebarkan gagasan *developmentalisme* ke Dunia Ketiga, pada tahun 1950-an dan 1960-an para ahli ilmu sosial, terutama pakar ilmu sosial yang tergabung dalam *Centre for International Studies* di Massachusetts Institute of Technology (MIT), berperan dalam membantu penyelenggaraan lokakarya yang berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang pembangunan. Sepanjang periode itu, para ahli ilmu sosial produktif menciptakan pengetahuan dan teori tentang pembangunan dan modernisasi.<sup>3</sup> Maka tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga kental diwarnai dengan teori-teori ekonomi Barat.

Kajian ekonomi negara-negara berkembang selama periode 1970-an dan 1980-an sesungguhnya sangat terkait erat dengan fakta mengenai adanya struktur hegemoni pada sistem ekonomi politik global. Kebijakan *Marshall Plan* dan diberlakukannya *Sistem Bretton Woods* dalam tatanan dunia perekonomian Internasional –yang semenjak kelahirannya memang mengandung “penyakit bawaan”- adalah salah satu indikasinya.<sup>4</sup> Negara-negara penyandang dana kuat seperti Amerika, disinyalir senantiasa memanfaatkan institusi-institusi perekonomian tersebut untuk kepentingan-kepentingannya sendiri demi menancapkan dominasi dan hegemoninya atas negara-negara lain, khususnya negara-negara Dunia Ketiga. Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara Dunia Ketiga.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 58.

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, hlm.71

<sup>4</sup> *Marshall Plan* adalah kesepakatan bersama antara AS dan negara-negara sekutunya di Eropa untuk mengelola perekonomian dunia pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi pasca perang. Pada tahun 1944 (menjelang berakhirnya PD II) diselenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 44 negara di *Bretton Woods*, New Hampshire, Amerika Serikat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan tiga lembaga ekonomi Internasional, yaitu: *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* yang biasa disebut Bank Dunia, dan *International Trade Organization (ITO)* yang menghasilkan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang sekarang menjadi *World Trade Organization (WTO)*. Lihat, Soediyono R, *Ekonomi Internasional; Pengantar Lalu-Lintas Pembayaran Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 39-46.

<sup>5</sup> Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholish, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 74.

Ironisnya, banyak pengambil kebijakan di negara-negara berkembang yang tidak menyadari (atau boleh jadi sadar tapi tidak bisa mengelak) dari kenyataan tersebut. Adopsi kebijakan-kebijakan ekonomi pembangunan oleh negara-negara tersebut berdasarkan ideologi dan teori-teori yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi historis dan kultur setempat (*a historis*) cenderung menemui kegagalan, bahkan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak terhadap tatanan sosio-ekonomi.<sup>6</sup> Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti keterbelangan, kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan, dan pengangguran masih terus berlangsung dan bahkan semakin buruk di hampir semua negara-negara berkembang, tak terkecuali negara-negara muslim dan termasuk juga Indonesia.

Perkembangan selanjutnya sistem kapitalisme ini dianggap gagal menciptakan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan ekonomi dunia, terlebih bagi negara-negara Dunia Ketiga. Lebih dari itu, kapitalisme dituding telah menciptakan jurang perbedaan dan “ketergantungan”<sup>7</sup> negara-negara Dunia Ketiga yang berdampak kepada semakin terpuruknya ekonomi negara-negara tersebut. Melihat kondisi seperti ini, negara-negara Dunia Ketiga umumnya, dan negara-negara muslim khususnya, dituntut untuk berusaha menutup jurang perbedaan dengan negara-negara industri besar yang sudah maju, dengan sumber daya yang dimiliki. Bagaimanapun negara-negara muslim punya nilai-nilai dan kebudayaan yang berbeda dengan Barat. Jika negara muslim terus menerus berada dalam ketergantungan, maka hal itu bukan saja menjebloskan mereka pada jebakan sistem ekonomi Barat, tetapi secara gradual akan mengikis sistem nilainya.<sup>8</sup>

Dengan kenyataan yang memprihatinkan dan mengancam identitas Islam, para pemikir Muslim mulai membahas dan mencari formulasi baru sistem ekonomi yang lebih menjamin keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dunia. Banyak usaha yang telah dilakukan para sarjana dan cendekiawan muslim untuk “mengislamkan ekonomi” yang pada gilirannya muncul gagasan ekonomi Islam yang dimaksudkan sebagai suatu sistem

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>7</sup> Ketergantungan oleh Dos Santos didefinisikan sebagai suatu situasi di mana ekonomi sekelompok negara dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain, di mana ekonomi sekelompok negara tersebut tunduk kepadanya. Ian Roxborough, *Teori-teori Keterbelakangan*, terj. Rohman Achwan (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 70.

<sup>8</sup> Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 140.

alternatif dari kapitalisme dan sosialisme yang bukan saja tidak sesuai dengan Islam, tetapi juga gagal memecahkan problem ekonomi negara-negara Dunia Ketiga.

Salah satu tokoh yang *concern* terhadap pembangunan ekonomi Islam adalah Muhammad Umer Chapra (selanjutnya disebut Chapra) yang mencoba merumuskan paradigma Islam sebagai alternatif pembangunan ekonomi masa depan. Ia adalah pakar ekonomi asal Pakistan yang mendapat pendidikan di Universitas Karachi Pakistan dan Minnesota Amerika Serikat. Ia aktif dalam lembaga-lembaga riset akademik baik di Pakistan sendiri maupun di negara-negara muslim lainnya. Ide-idenya banyak tertuang dalam karya-karya tulis yang telah banyak dipublikasikan. Karya pertamanya, *Toward a Just Monetary System*, mendapat penghargaan dari *Islamic Development Bank Award* atas pengabdianya terhadap ekonomi Islam dan mendapat penghargaan dari *King Faisal International Price* dalam bidang kajian Islam.<sup>9</sup> Dalam kajian-kajiannya tentang ekonomi Islam ia banyak membahas mengenai pembangunan ekonomi dan sistem moneter. Ia mengatakan bahwa dalam pembangunan materi dengan keadilan tidak mungkin tanpa adanya pembangunan moral. Pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya yang adil dan efisien, hal ini tidak dapat diaktualisasikan tanpa adanya injeksi moral dalam dunia perekonomian.<sup>10</sup>

Tertarik dengan hal ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Chapra, khususnya pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pemikiran ini patut ditelaah secara mendalam setidaknya ada dua nilai penting yang mendasarinya. *Pertama*, pemikiran tersebut pada tataran metodologis menawarkan cara pandang yang berbeda dengan metodologi-metodologi ekonomi konvensional. *Kedua*, pada tataran praktis pemikiran ini mencerminkan salah satu upaya kreatif untuk membumikan ekonomi Islam sekaligus sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi saat ini yang telah gagal mewujudkan kesejahteraan ummat.

---

<sup>9</sup> Kursyid Ahmad, dalam pengantar karya M. Umer Chapra, *Islam dan Tangan Ekonomi*, hlm. x-xi.

<sup>10</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 6.

### Biografi Chapra dan Karir Intelektualnya

Muhammad Umer Chapra adalah ekonom asal Pakistan yang dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933 di Bombay.<sup>11</sup> Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Ia dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya juga merupakan keluarga yang cukup mapan dalam hal ekonomi, sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang mendukungnya untuk meraih bidang keilmuan yang ia tekuni. Pada usia kurang lebih lima belas tahun ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di sana. Sejak itu ia berkonsentrasi pada pendidikannya hingga ia meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang kedua puluh sembilan tahun ia mengakhiri masa lajangnya, ia menikahi seorang wanita yang bernama Khoirunnisa Jamal Mundia, tepatnya pada bulan Mei 1962. Perjalanan hidup dengan keluarganya berjalan harmonis dan dikaruniai empat orang anak, yaitu dua orang putra dan dua orang putri (Maryam, Anas, Sumayyah, dan Ayman).

Dalam hal karir intelektual, Chapra mengawalinya ketika ia mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa yang ikut di dalamnya. Setelah meraih gelar B. Com (=BBA) dan M. Com (=MBA) dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika ia meraih gelar Doktor di bidang ekonomi dengan predikat *summa cum laude* pada tahun 1961 dari Universitas Minnesota, Minneapolis. Pembimbingnya, Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah orang yang baik hati yang mempunyai karakter baik dan kecermelangan akademis. Chapra merupakan orang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya di kalangan mahasiswanya saja, tapi juga diseluruh fakultasnya.

Chapra telah banyak terlibat dalam organisasi dan pusat penelitian yang mempunyai konsentrasi terhadap ekonomi Islam. Ia menjadi Dewan Penasehat pada *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) dari *Islamic Development Bank* (IDB), Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di *Saudi Arabian Monetary Agency*

---

<sup>11</sup> Seluruh tulisan dalam bab ini disarikan dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang M. Umer Chapra, baik riwayat hidupnya, karir intelektualnya dan karya-karya yang dihasilkannya. Adapun literatur-literatur tersebut yaitu: pertama, dari karya-karyanya sendiri yang telah dipublikasikan, yang di dalamnya mengupas sedikit tentangnya, di antaranya; *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2000); *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000); *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000); *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000). Kedua, dari beberapa karya orang lain yang menulis tentang pemikiran M. Umer Chapra.

(SAMA), Riyadh, selama hampir 35 tahun sebagai Penasehat Ekonomi Senior (*Senior Economic Advisor*). Selama kurang lebih 45 tahun, ia menduduki profesi penting di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi di antaranya, 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi.

Ia banyak berpartisipasi dalam beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC, AMF, dan beberapa organisasi internasional dan regional lainnya. Ia juga berpartisipasi di beberapa seminar dan konferensi seputar ekonomi dan keuangan Islam yang diselenggarakan di beberapa negara di seluruh dunia. Chapra juga aktif dalam beberapa penerbitan sebagai Dewan Penasehat dari berbagai jurnal profesional, seperti: *The Economic Journal (The Royal Economic Society)*, *The Pakistan Development Review*, *American Journal of Islamic Social Sciences*, *Journal of Islamic Studies (Oxford University)*, *Islamic Studies (Islamabad)*, *Review of Islamic Economics*, *Journal of Islamic Economics (King Abdul Aziz University)*, dan beberapa jurnal lainnya.

Selain memberikan kuliah formal di beberapa universitas terkemuka, ia juga memberikan kuliah-kuliah informal dan mempresentasikan karya-karya ilmiahnya di beberapa negara, di antaranya Bahrain, Banglades, Jerman, India, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Marocco, Pakistan, Arab Saudi, Afrika Utara, Spanyol, Turki, UAE, UK, dan Amerika Serikat. Ia juga aktif memberikan kuliah informal tiap minggu di Riyadh dan Jeddah dalam bidang studi al-Qur'an di *Qur'an Study Circle*. Chapra mempunyai peran yang sangat penting dalam kajian-kajian keislaman, terutama dalam bidang ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karya-karyanya. Oleh karena pengabdianya terhadap kajian-kajian Islam inilah kemudian ia banyak mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga, di antaranya dari *Islamic Development Bank Award* dalam bidang kajian ekonomi Islam, dan dari *King Faisal International Award* di bidang kajian Islam. Keduanya diperoleh pada tahun 1989. Kemudian ia juga menerima medali emas dari *Institute of Overseas Pakistanis* atas pengabdianya terhadap Islam dan Ekonomi Islam.

### **Karya-Karya Chapra**

M. Umer Chapra adalah sosok yang banyak terlibat dalam lembaga-lembaga ataupun organisasi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Selain itu ia juga aktif menulis ide-ide cemerlangnya tentang ekonomi Islam. Ia telah banyak menerbitkan buku-buku dan monograf, karya ilmiah, resensi dan artikel. Sampai saat ini terhitung ada sebelas buku yang telah terbit, enam puluh sembilan karya ilmiah dan sembilan resensi buku. Buku-buku dan karya ilmiahnya telah banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya

bahasa Arab, Urdu, Turki, Malaysia, Indonesia, Banglades, Prancis, Jepang, Jerman dan Spanyol. Buku-bukunya tersebar luas di beberapa negara. Ada beberapa buku yang cukup terkemuka dan banyak mendapat pujian dari beberapa pihak atas kecermelangan ide-ide yang tertuang di dalamnya, yaitu: *Toward a Just Monetary System* (1985), *Islam and The Economic Challenge* (1992), *Islam and the Economic Development* (1994), dan *The Future of Economic: An Islamic Perspective* (2000).

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, masih banyak sederetan daftar buku-bukunya dan karya ilmiahnya yang telah dipublikasikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *The Economic System of Islam* (diterbitkan bersama Islamic Centre, London, and the University of Karachi, 1970).
2. *Objectives of the Islamic Economic Order* (Leicester, U.K.: the Islamic Foundation, 1979).
3. *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979).
4. *Allocation of Bank Credit in Pakistan* (Karachi: Economic Research Academy, Desember, 1963).
5. *What is Islamic Economics?* (Jeddah, IRTI/IDB, No. 9 dalam IDB Prize Winners' Lecture Series, 1996).
6. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah, IRTI/IDB, Occasional Paper No. 3, 2000).
7. *Prohibition of Interest: Does it Make Sense?* (Durban: Islamic Da'wah Movement, August, 2001).

Karya-karya ilmiah yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagian dari tulisan-tulisan Chapra. Masih banyak karya-karya lainnya yang banyak dimuat dalam jurnal, artikel dan lain sebagainya yang tentu tidak dapat diidentifikasi satu persatu oleh penulis. Namun dari karya-karya yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa sosok Chapra adalah tokoh yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi Islam.

### **Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam**

Pada bagian ini, penulis ingin mengulas beberapa unsur konsep pembangunan yang Islami. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan



perbaiki ekonomi secara berkelanjutan, aktual dan potensial. Biasanya dihitung dalam istilah per-kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada dimungkinkannya manusia untuk mengendalikan lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Islam memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Prof. Khurshid Ahmad, merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai “dasar-dasar filosofis” pembangunan yang Islami,<sup>12</sup> dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial.
- d. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Selanjutnya, Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falah*, yaitu sukses di dunia maupun akhirat.<sup>13</sup>

Dari gambaran di atas, tentu kita boleh bertanya, mengapa hanya empat saja, dan mengapa konsep-konsep itu yang dipilih? Bagaimana halnya dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), umpamanya? Pemikir lain bisa pula menambahkan bahwa salah satu prinsip Islam di bidang ekonomi adalah “kebebasan” (*economic freedom*). Ini tidak berarti bahwa konsep yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad keliru. Hanya saja, Khurshid Ahmad tidak bisa mengklaim konsepnya

---

<sup>12</sup> Khurshid Ahmad, “Economic Development in an Islamic Framework” dalam *Studies Islamic Economics*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976, h. 178-179

<sup>13</sup> *Ibid.*

adalah salah satunya penafsiran yang benar. Mengetahui hal itu maka kita sebenarnya bisa memilih teori yang kita rasakan sejalan dengan yang sedang kita pikirkan di Indonesia, yang kita sebut Ekonomi Pancasila itu. Asas *tauhid*, *khalifah* dan *tazkiyah* pada akhirnya menuju ke perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Asas *tauhid* mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas *khalifah* mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Dan asas *tazkiyah* mencegah kepincangan sosial. Kesemuanya itu akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pelaksanaan asas *rububiyah*, yakni asas pendidikan, pemeliharaan dan kontinuitas menuju kepada kesempurnaan, seperti sifat *Ilahi*.

### **Pandangan Chapra Terhadap Sistem Ekonomi Dunia**

Pokok-pokok pemikiran Chapra dalam bidang ekonomi sangat luas tertuang dalam beberapa karya, sebagaimana penulis telah paparkan pada bab sebelumnya. Namun dari sekian banyak karyanya, buku "*Islam and Economic Development*" dan "*Islam and The Economic Challenge*" dianggap paling komprehensif dan representatif terhadap pemikiran Chapra di bidang ekonomi Islam, khususnya aspek komparasinya dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam buku ini, Chapra mengkaji dengan kecanggihan dan ketelitian seorang pakar terhadap tiga sistem ekonomi Barat dan berakhir dengan suatu lembaran neraca realistis dari prestasi-prestasinya maupun kegagalan-kegagalannya. Dia juga mengemukakan pendekatan Islam terhadap ekonomi dan persoalan-persoalannya serta mengajukan solusi-solusi konkrit bagi restrukturisasi perekonomian dunia Islam, sekaligus memperlihatkan jalan-jalan baru menuju perencanaan pembangunan. Berikut selintas beberapa pandangan Chapra tentang berbagai isu sistem ekonomi dunia:

### **Kegagalan Kapitalisme**

Menurut Chapra, Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya "*capital*". Pandangan dunia kapitalis sangat dipengaruhi oleh gerakan pencerahan (*enlightenment*) pada permulaan abad ke-17-19. Abad ini sering juga disebut sebagai "abad rasio" (*the Age of Reason*). Dalam bentuknya yang ekstrim adalah suatu penolakan, dan dalam banyak hal, merupakan antitesis terhadap kepercayaan Kristen.<sup>14</sup> Penolakannya terhadap

---

<sup>14</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000, hlm. 21.

agama dalam perekonomian menjadi ciri khas sistem ini. Hal ini mengakibatkan penentangan terhadap penilaian yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral. Aksi-aksi manusia hanya dilihat dari kaca mata *utilitarianisme*, apa yang baik dan mendatangkan kesenangan sensual adalah kebenaran. Pandangan seperti ini membangkitkan konsep “manusia ekonomi” (*homo economicus*) yang berfungsi sebagai pelaku ekonomi modern. Kepentingan individu menjadi motor penggerak. Konsumsi adalah tujuan tertinggi dari kehidupannya, memaksimalkan penghasilan dan memenuhi keinginan menjadi kebijakan tertinggi konsep ini.<sup>15</sup>

Meskipun kapitalisme telah mengalami modifikasi secara terus menerus untuk memperbaiki kekurangannya, bagaimana pun tetap mempunyai ciri-ciri pokok yang tidak pernah lepas dari model aslinya. Chapra menguraikan lima ciri utama kapitalisme sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemuasan “keinginan” (*want*) sesuai dengan preferensi individu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan manusia;
- 2) Ia menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi dan untuk memiliki serta mengatur kepemilikan pribadi (*private property*) sebagai sebuah keharusan bagi inisiatif individu;
- 3) Ia mengasumsikan inisiatif individu bersama dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat yang mencukupi untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam pengalokasian sumber daya;
- 4) Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi; dan
- 5) Ia mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) oleh semua individu juga akan secara otomatis memenuhi kepentingan sosial bersama.

Ciri-ciri tersebut merupakan pandangan yang tidak realistis. Asumsi bahwa segala sesuatu yang menjadi kepentingan individu dengan sendirinya merupakan wujud terhadap kepentingan masyarakat sepenuhnya tidak benar, karena bagaimanapun kepentingan individu tidak selamanya seirama dengan kepentingan sosial, terutama karena di dalam lingkungan sekuler tidak ada

---

<sup>15</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000, hlm. 21.

<sup>16</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 18

motivasi untuk mengedepankan kepentingan sosial manakala hal tersebut bertentangan dengan kepentingan individu. Contohnya, suatu pengurangan substansial terhadap konsumsi barang murah oleh si kaya sangat diperlukan untuk meningkatkan investasi dan tabungan yang akan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan secara umum, namun hal ini tidak selamanya merupakan kehendak orang-orang kaya.<sup>17</sup>

Kapitalisme yang berpijak pada kepentingan individu pada akhirnya tidak dapat melakukan mekanisme filter yang secara sosial disepakati. Ia tidak dapat membedakan antara kebutuhan (*need*) dengan keinginan (*want*). Dalam ketiadaan nilai-nilai ini dan peran pemerintah untuk menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dijangkau dalam kerangka-kerangka sumber daya dan pemenuhan kebutuhan universal, maka tidak akan ada filter bagi si kaya terhadap pemenuhan kepuasan maksimalnya, di mana hal tersebut berdampak kepada distorsi terhadap pemenuhan kebutuhan orang lain.<sup>18</sup>

Dalam usaha memperoleh keuntungan maksimal, dunia bisnis telah menjebak konsumen yang berdaulat dengan serangkaian promosi lewat media tulis atau pun media elektronik. Mereka membujuk kepolosan konsumen untuk selalu mengkonsumsi barang-barang sebagai bentuk dari pengaktualisasian diri dan prestisenya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian penilaian konsumen telah didoktrin dengan budaya konsumerisme. Sederetan keinginan artifisial telah diciptakan melalui kompetisi tak berujung sebagai status simbol. Dengan kondisi demikian, maka asumsi tentang pasar persaingan sempurna telah menjadi impian yang tidak pernah dapat diwujudkan karena ada tendensi, di bawah kapitalisme menuju ke arah promosi bisnis besar dan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan.<sup>19</sup>

Sistem pasar juga mengasumsikan bahwa kesediaan konsumen untuk membayar harga pasar adalah refleksi dari urgensi kebutuhan. Asumsi ini juga keliru karena misalnya, urgensi membeli susu sama bagi semua anak-anak, dengan mengabaikan apakah mereka kaya atau miskin, namun jumlah uang yang dimiliki si miskin untuk membeli susu tidak sama dengan yang dimiliki si kaya untuk memperoleh status simbol. Dengan begitu sistem harga tidak menciptakan pemerataan dalam efisiensi, namun sistem harga telah melahirkan darwinisme sosial dalam aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Si kaya tetap menjadi yang terdepan karena kemudahan aksesnya untuk

---

<sup>17</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 35.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44. Lihat juga Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 20.

memperoleh kepuasan-kepuasan sensualnya, sedang si miskin semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

Berkaca dari sejarah dan pengalaman, anggapan simetri terhadap kepentingan individu tidak pernah menunjukkan kebenaran. Kapitalisme telah gagal menciptakan efisiensi dan pemerataan. Tangan ghaib dari kekuatan pasar yang hanya dibimbing oleh kepentingan individu telah menyebabkan keadaan yang dalam ucapan Dalton, sebagaimana dikutip Chapra, “Suatu masyarakat komersialisme binal, pembagian sosial, konflik antara majikan dan karyawan, tuan tanah dan penyewa, penguasa dan rakyat yang tidak adil, tidak nyaman dan tidak berprinsip kemanusiaan.”<sup>21</sup> Sistem pasar yang dianggap sebagai sistem yang mampu menciptakan alokasi dan distribusi yang merata dan efisien, ternyata juga gagal. Pasar, sebagaimana yang dikatakan Arthur Okun, telah menghancurkan pemenang-pemenang pasar, sehingga dapat memberi makan anjing-anjing mereka dengan makanan bergizi dari pada pihak yang kalah untuk memberi makan buat anak-anaknya.<sup>22</sup>

Kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat difahami lewat pandangannya terhadap dunia yang hanya mementingkan kehidupan materi yang dititikbertkan pada pemuasan keinginan individu. Salah satu kelemahan paling mendasar dalam sistem ini adalah tidak adanya nilai-nilai moral yang mendasarinya. Sistem pasar terlalu memperhitungkan untung rugi dalam pemenuhan kebutuhan manusia.<sup>23</sup> Sehingga pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi tidak efisien.

### **Mundurnya Sosialisme**

Kegagalan kapitalisme *laissez faire*,<sup>24</sup> telah menimbulkan munculnya sistem baru yang lebih memusatkan pada peran pemerintah yang maksimal, yaitu sosialisme. Pada hakekatnya kapitalisme dan sosialisme mempunyai

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 19

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 9. Lihat juga dalam tulisan Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terj. Sutan Diajung, Jakarta: Galia Indonesia, 1982, hlm. 321

<sup>24</sup> *Laissez faire* adalah istilah yang muncul pada abad ke-17 pada waktu pemerintahan Louis XIV di Prancis. Istilah ini muncul ketika seorang Menteri Keuangan Prancis, Jean Bapiste Colbert, bertanya kepada seorang pengusaha, Legendre, “apa yang dapat dibantunya dalam dunia usaha?” Jawabannya adalah “*laissez nous faire*” (jangan mengganggu kita). Pernyataan ini kemudian menjadi motto kapitalisme dengan pengertian meniadakan intervensi pemerintah dalam perekonomian masyarakat. Lihat, Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung: Remadja Karya, 1986, hlm. 35.

pandangan yang sama terhadap kehidupan bahkan sosialisme bisa dikatakan lebih sekuler dari kapitalisme. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan yang tajam dalam hal strategi penciptaan kesejahteraan. Sosialisme memiliki suatu ketidakpercayaan terhadap kemampuan manusia untuk berbuat demi kepentingan masyarakat. Karena itu ia menghadiahkan pelembagaan individu dan motif memperoleh keuntungan serta eliminasi terhadap hak milik properti. Strategi yang logis kemudian adalah pemilikan negara atas semua sarana produksi dan perencanaan sentral untuk mendorong efisiensi dan pemerataan penggunaan sumber daya-sumber daya.<sup>25</sup>

Menurut Chapra, ada beberapa asumsi yang tidak realistis dan salah dalam pandangan sosialisme. *Pertama*, manusia diasumsikan tidak bisa dipercaya untuk mengelola bisnis pribadi mereka dalam keseluruhan batas-batas kesejahteraan sosial. Kemudian bagaimana mungkin mereka dapat mengelola alat-alat produksi seluruh bangsa lewat pemerintah yang juga berasal dari individu-individu. Apa jaminan bagi terlaksananya kepentingan masyarakat. Ini kemudian pertanyaan-pertanyaan mendasar atas asumsi sosialis yang meniadakan kepercayaan terhadap individu. Asumsi ini oleh Chapra dianggap suatu yang tidak realistis dan ilusif mengingat sosialis juga merupakan sistem sekuler, bahwa individu itu tidak akan mementingkan dirinya sendiri sebagai prioritas, karena di dalamnya tidak ada basis spiritual untuk kehidupan. Jika individu tidak dapat memuaskan kepentingan sendirinya ini akan berdampak buruk pada motivasi dan produktifitas. Hal inilah yang tidak diantisipasi oleh sosialisme, sehingga realisasi-realisasi tujuan sosial terhambat sekali pun dilakukan dengan cara pemaksaan.<sup>26</sup>

*Kedua*, diasumsikan bahwa pemerintahan akan dijalankan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang seirama dengan kepentingan masyarakat. Ini oleh Chapra dianggap keliru karena sebuah masyarakat totalitarian sekalipun tidak akan dapat melepaskan diri dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang muncul dari faktor-faktor seperti posisi dalam struktur kekuasaan, persaingan, dan asal daerah. Dalam ketiadaan orientasi moral, tidak aka ada mekanisme yang dapat menciptakan keharmonisan kepentingan. Bahkan, dalam sebuah perekonomian perencanaan sentral sekalipun, alokasi sumber daya yang seirama dengan sasaran-sasaran sosial tetap menuntut adanya penilaian (*value judgement*) di samping ungkapan pilihan oleh konsumen.

---

<sup>25</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 23.

<sup>26</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 78

*Ketiga*, diasumsikan bahwa perencanaan pusat memiliki informasi mengenai referensi konsumen, ongkos produksi, dan harga yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai keputusan. Betapapun juga informasi demikian tidak tersedia, karena ketidakmungkinan memiliki informasi seperti ini tanpa adanya interaksi bebas antara permintaan dan penawaran di dalam pasar. Sekalipun informasi itu tersedia namun tugas untuk membuat keputusan akan sangat sukar, karena menyangkut alokasi sumber daya bagi jutaan konsumen, barang atau jasa. Dan jika hal ini tetap dipaksakan maka prosesnya akan cukup lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga keputusan yang dibuat akan terlambat merespons keadaan-keadaan yang terus berubah.

*Keempat*, diasumsikan bahwa subsidi-subsidi besar yang terdapat dalam sistem penentuan harga di (bekas) Uni Sovyet akan bermanfaat bagi orang-orang miskin. Ini terbukti salah. Subsidi-subsidi umum ternyata lebih menguntungkan kelompok kaya yang punya hak istimewa dari pada kelompok-kelompok miskin karena daya beli mereka yang terbatas. Adanya subsidi juga telah menyebabkan kemubaziran bagi sumber-sumber daya yang langka. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Mikhail Gorbachev dalam salah satu konferensi persnya, “orang dapat melihat anak-anak membawa selembar roti sebagai bola dalam permainannya”.

*Kelima*, diasumsikan bahwa pertanian-pertanian besar monopolistik dan BUMN-BUMN akan beroperasi secara efisien sekalipun mengalami skala disekonomi, kurangnya kompetisi, dan ketiadaan sinyal-sinyal pasar. Hal ini juga tidak benar. Pertanian-pertanian besar pada umumnya menanam bermacam-macam jenis tanaman, juga berbagai jenis peternakan dan memiliki sejumlah buruh yang hidup secara terpencar, hal ini menyebabkan sulitnya kontrol dari super visi yang pada akhirnya pertanian tidak efisien. Ketiadaan kompetisi permanen juga telah menghapuskan insentif bagi BUMN untuk menggunakan secara ekonomis input-input atau memperkenalkan inovasi.

Impian kaum sosialis untuk menciptakan sebuah masyarakat egalitarian yang penuh dengan rasa persaudaraan tanpa adanya upah, tanpa kelas sosial, dan akhirnya tanpa negara tetap tidak terwujud. Kaum buruh masih tetap sebagai penerima upah dengan kebebasan bergerak yang sempit. Kelas sosial juga masih tetap ada tanpa perubahan yang signifikan. Diktator pemerintah tidak dapat diwujudkan. Sementara lenyapnya negara juga belum dapat dilihat, malahan negara semakin kuat dan penuh kuasa.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

### **Krisis Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan timbul akibat ketidakmerataan strategi kapitalis. Ia memperoleh momentumnya ketika terjadi depresi besar yang menimpa kapitalisme, dan setelah prang dunia kedua.<sup>28</sup> Tujuan jangka pendeknya adalah untuk menghapuskan eksese-eksese kapitalisme yang paling mencolok dan mengurangi daya tarik sosialisme. Menurut sebagian kritiknya, ia mewakili sebuah gerakan manajemen sosial dari atas yang bertujuan menjamin tatanan sosial tanpa transformasi kekuasaan esensial dari strata penguasa kepada mayoritas bawahan.<sup>29</sup>

Falsafah tersebut menunjukkan menjauhnya sistem ini dari prinsip-prinsip darwinisme sosial yang, sadar atau tidak, telah menjadi prinsip kapitalisme *laissez faire*. Namun begitu, ia tidak mengakui perlunya perubahan-perubahan radikal dalam sistem pasar dan memperbaiki ketidakmerataan akibat kapitalisme *laissez faire*. Tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan lewat enam alat negara, yaitu: regulasi, nasionalisasi industri-industri kecil, serikat perburuhan yang kuat, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesempatan kerja penuh.<sup>30</sup>

Bagi Chapra keenam alat negara ini tidak cukup efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang baik. Regulasi misalnya, walaupun hal ini menjamin terciptanya kompetisi, terpeliharanya tatanan dan standar, serta perlindungan hak-hak orang lain, namun tanpa adanya nilai-nilai kolektif yang secara universal diakui, maka dalam masyarakat pluralis yang setiap orang mengedepankan kepentingannya sendiri, negara akan berada dalam kondisi netral bagi setiap kelompok, tindakannya hanya akan menjadi sasaran tawar-menawar dan perlombaan politik. Hasil akhir dari regulasi ini hanya cenderung memihak kepada yang kaya dan yang kuat, karena mereka akan menggunakan sumber dayanya untuk memenangkan perlombaan politik yang pada ujungnya mereka dapat menentukan regulasi yang menguntungkan mereka.<sup>31</sup>

Gerakan nasionalisasi industri-industri utama juga telah kehilangan momentumnya. Kemudian yang menjadi trend global adalah privatisasi, dan hal ini telah berlangsung di Eropa Barat. Alasan utama perubahan ini bukan

---

<sup>28</sup> Depresi ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930. Depresi ini diakibatkan oleh demam spekulasi dari seluruh perekonomian tahun 1929. Tahun 1929 terdapat 1,5 pengangguran dan pada tahun 1933 membengkak 8 kali lipat sehingga satu dari empat tenaga kerja menganggur, Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, hlm. 163.

<sup>29</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 133.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 116.



persoalan politik, tapi lebih kepada persoalan keuangan. Nasionalisasi di samping telah menyebabkan kemunduran kinerja industri-industri yang dinasionalisasikan, ia juga telah mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat akibat subsidi yang harus dikeluarkan untuk menjamin kelangsungan hidup industri-industri tersebut.

Sama halnya dengan nasionalisasi, gerakan serikat buruh juga kehilangan momentumnya yang diakibatkan oleh inflasi dan pengangguran yang tinggi. Namun menurut Chapra, hal itu bukan penyebab utamanya, ada sebab lainnya yang tidak kalah penting, yaitu sebagian akses serikat itu sendiri, yang dipicu oleh usaha mencapai kepentingan sendiri dari para anggotanya yang agresif dan vokal. Kurangnya kepedulian terhadap dampak buruk dari kebijakan mereka juga menjadi penyebab menurunnya dukungan para industrialis dan kaum awam.<sup>32</sup>

Kebijakan fiskal dalam negara kesejahteraan adalah alat utama. Ia meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan progresif, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Penggunaan belanja pemerintah dalam 50 tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya pertahanan dan pembiayaan transfer, penurunan dan investasi pemerintah dan adanya infleksibilitas ke bawah dalam pengeluaran total. Akibat dari pengeluaran yang cukup tinggi ini, maka solusinya adalah menaikkan pajak atau meningkatkan pinjaman. Kenaikan ini berdampak kepada semakin tidak stabilnya perekonomian, pengangguran meningkat dan laju inflasi semakin tinggi.

Kesempatan kerja penuh, yang merupakan salah satu instrumen *welfare state*, terbukti juga gagal meningkatkan kondisi kaum miskin. Pengangguran masih menjadi persoalan yang belum dapat dipecahkan. Pengangguran pada tahun 1990 berada pada angka 8,1 % di negara-negara kesejahteraan, tiga kali lipat dari tahun 1970. Pada tahun 1986 juga pernah mengalami tingkat tertinggi yaitu 9,9 %, diperkirakan laju itu tidak akan turun secara signifikan di bawah peningkatan ini dalam waktu yang singkat.<sup>33</sup>

Persoalan-persoalan yang timbul di negara-negara kesejahteraan tidak lain karena ia juga menghadapi kelangkaan sumber-sumber daya, sama seperti negara lainnya. Yang diperlukan oleh negara kesejahteraan adalah membangun prioritas-prioritas berdasarkan mekanisme filter yang secara sosial disepakati dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

memotivasi orang untuk mereorientasi preferensi dan klaimnya pada sumber-sumber daya yang seirama dengan prioritas-prioritas ini.

### **Tawaran M. Umer Chapra Tentang Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam**

Bertolak dari kritik-kritik Chapra terhadap sistem ekonomi dunia yang telah mengalami kegagalan dalam beberapa hal. Ia mencoba memformulasikan suatu sistem baru yang lebih humanis dan berkeadilan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan kesenjangan yang terlalu lebar. Pembangunan ekonomi dengan keadilan tentunya membutuhkan pembangunan moral sebagai suatu keniscayaan. Inilah yang menjadi tesis utama dari pembangunan ekonomi yang ditawarkannya.<sup>34</sup>

Menurutnya, perbaikan tiap aspek masyarakat Islam adalah dengan cara membiayai perkembangan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral.<sup>35</sup> Pembinaan manusia harus menjadi prioritas utama, karena ia tujuan dan sarana bagi setiap kemajuan. Jika manusia tidak benar, maka tidak ada sesuatu yang benar. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga ia mengubah diri mereka sendiri.*” (al-Ra’du: 11)

Sebelum lebih jauh memahami konsep dan strategi pembangunan ekonomi Islami versi Chapra, terlebih dahulu harus memahami konsep-konsep ekonomi Islam yang ditawarkannya, hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh pemahaman yang integral dari keseluruhan pemikirannya tentang ekonomi Islam dan pembangunannya. Bagaimanapun konsep dan strategi yang ditawarkan olehnya tetap mengacu kepada konsep-konsep umumnya tentang ekonomi Islam itu sendiri.

Menurutnya, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengaku individualisme yang berlebihan dalam ekonomi ekonomi klasik.

---

<sup>34</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 9.

<sup>35</sup> Pernyataan ini diutarakan oleh Chapra, ketika beliau diwawancarai oleh tim redaksi majalah Islam Sabili, “Pembinaan Manusia Jadi Prioritas”, *SABILIL*, 94 April 2002, np. 20, th., IX, hlm. 30.

Adapun tujuan sistem ekonomi menurutnya, sangat ditentukan oleh pandangannya terhadap dunia. Pandangan ini akan sangat menentukan tujuan dan strategi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Islam, sebagai pandangan hidup, mempunyai pandangan yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Pandangan hidup Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu: *tauhid* (keesaan Allah), *khilafah*, dan *'adalah* (keadilan). *Tauhid* adalah konsep utama dari ketiganya, karena dua di antaranya merupakan turunan logika darinya. *Tauhid* adalah pengakuan terhadap keesaan Allah. *Tauhid* mengandung implikasi bahwa alam semesta tidak ada dengan sendirinya, namun dibentuk dan diciptakan oleh Allah SWT. Penciptaan segala sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan inilah yang kemudian memberikan eksistensi bagi alam semesta di mana manusia termasuk di dalamnya.

Jika demikian, manusia yang dibekali akal, kesadaran moral dan kesadaran ketuhanan yang inheren dituntut untuk hidup dalam kepatuhan dan ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, konsep *tauhid* bukan sekedar pengakuan realitas, tetapi suatu respons aktif terhadap-Nya.<sup>36</sup>

Konsep *khilafah* adalah konsep yang menyatakan bahwa manusia adalah *khilafah* (wakil) di muka bumi. Ia mempunyai tanggung jawab kepada Allah dalam segala perbuatannya di muka bumi. Apa yang ada di tangan manusia termasuk sumber-sumber daya merupakan *amanah* yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tuntunan agama. Konsep *khilafah* mencakup semua manusia, bukan perorangan, kelompok atau tegara tertentu, ini mengandung arti persatuan fundamental dan persaudaraan manusia.

Konsep *'adalah* meliputi pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini adalah agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Lima unsur ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan dapat ditegakkan lewat pendistribusian kekayaan yang merata. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam yang berdampak kepada distorsi pemenuhan kebutuhan orang lain.<sup>37</sup>

Ketiga konsep di atas saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kepercayaan kepada keesaan Tuhan dan pembangunan moral terimplementasi dalam semua nilai dalam rangka penegakan yang diwajibkan

---

<sup>36</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 6.

<sup>37</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 212. Mengenai pemenuhan kebutuhan pokok semua *fuqaha* klasik sepakat dengan hal tersebut. Demikian pula dengan para cendekiawan muslim masa kini juga menyatakan hal yang sama. *Ibid.*, hlm. 213.

oleh Allah SWT lewat al-Qur'an dan al-Hadis. Ia berfungsi sebagai batu loncatan segenap aksi kebijakan termasuk penegakan keadilan.

Tujuan ekonomi Islam, menurut Chapra, sejalan dengan tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia bahkan kepada semesta alam (*rahmatan li al-alamîn*). Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan psikis yang mengantarkan pada kedamaian mental dan kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral, sementara pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.<sup>38</sup>

Pandangan Chapra ini dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok manusia sejalan dengan pemikiran al-Syâtîbî (w. 790 H./1388 M.), bahwa ada lima kebutuhan esensial (*five basic needs*) –yang dikenal dengan *maqashid al-syariah*– agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya di muka bumi dan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Yaitu: (1) terpenuhinya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan (*al-dîn*), (2) terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan (*al-'aql*) yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru, (3) terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (*al-nafs*), (4) terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin pergantian generasi (*al-nasl*), dan (5) terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan menyucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, kertas, dan papan (*al-mâl*).<sup>39</sup>

Lebih jauh Chapra mengatakan, karena mayoritas penduduk negara-negara berkembang (baca: termasuk Indonesia) hidup di wilayah pedesaan, maka kesejahteraannya hanya dapat dijamin melalui pembangunan pedesaan dan pertanian. Dengan demikian, pembangunan pedesaan melalui sektor pertanian bukanlah suatu opsi, melainkan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan pertanian harus menjadi bagian fundamental dari tujuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>39</sup> Lihat, Abû Ishâq al-Syâtîbî, *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 2000, hlm. 8.

kebijakan, jika tujuannya adalah memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dasar dari keseluruhan penduduk, dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, kebutuhan pokok difungsikan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila diinterpretasikan maka kebutuhan dasar ini bisa berupa pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta berkecukupan sandang, pangan dan papan.

### **Strategi Ekonomi Islam**

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi Islam secara khusus dan *maqashid al-syari'ah* umumnya, perlu adanya rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis yang cukup vital untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan.<sup>41</sup>

*Pertama*, adanya mekanisme filter untuk menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan yang boleh diakui. Dalam hal ini Islam mempunyai filter moral yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya. Pada alokasi sumber daya akan dipasang dua lapis filter. Filter pertama menyerang persoalan keinginan yang tidak terbatas pada kesadaran individu yang paling dalam dengan mengubah skala preferensinya sesuai dengan tuntutan sebagai *khalifah* dan prinsip keadilan (*'adalah*). Dengan cara ini klaim-klaim yang tidak mempunyai sumbangan positif pada realisasi kesejahteraan manusia dapat dihilangkan sebelum memasuki filter tahapan kedua, yaitu harga yang ditentukan oleh pasar lewat mekanisme penawaran dan permintaan.

*Kedua*, motivasi yang benar yang dapat mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sekaligus kepentingan sosial. Tidak seperti halnya kapitalisme yang menganggap bahwa bertindak untuk kepentingan sendiri pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial, atau bahkan sosialisme yang memenjarakan kepentingan diri sendiri, Islam mempunyai pendekatan sendiri, yaitu melayani kepentingan sosial adalah melayani diri sendiri. Ini bukan berarti Islam tidak mengindahkan kepentingan individu. Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan individu dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif diri sendiri, dorongan, efisiensi dan kewirausahaan. Namun harus dikontrol oleh mekanisme internal yang mampu

---

<sup>40</sup> Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 39-40.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 80-84.

bekerja secara otomatis dengan penekanan yang tidak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, persaudaraan manusia, dan keadilan sosio-ekonomi.

*Ketiga*, restrukturisasi sosio-ekonomi. Hal ini sebagai antisipasi terhadap ketidak efektifan nilai-nilai di atas, boleh jadi nilai-nilai tersebut dilanggar dan gagasan mengenai pertanggungjawaban kepada Allah dalam banyak kasus terlalu lemah pengaruhnya meski dalam masyarakat yang bermuatan moral sekalipun. Karena itu perlu adanya restrukturisasi sosio-ekonomi untuk memperkuat nilai-nilai moral. Namun restrukturisasi harus bertujuan:

1. Menghidupkan faktor kemanusiaan dengan motivasi individu untuk aktif dalam merealisasikan efisiensi dan pemerataan.
2. Mengurangi konsentrasi kekayaan, kekuasaan ekonomi dan politik yang berlaku.
3. Mereformasi semua institusi sosial, ekonomi dan politik, termasuk keuangan publik, lembaga finansial menurut ajaran Islam, membantu meminimalkan konsumsi yang tidak perlu.
4. Mendorong investasi.

*Keempat*, peran negara. Negara harus berperan aktif dalam perekonomian dan berorientasi pada sasaran di dalam ekonomi. Peran ini bukan peran yang totaliter, namun lebih bersifat komplementer yang dimainkan pemerintah lewat internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat. Dalam hal ini negara tidak boleh dimainkan secara acak, ia harus dimainkan dalam batas-batas syari'ah dan melalui saluran demokratis serta konsultasi. Yang menjadi tuntutan negara adalah penggunaan kebijakan dalam memberlakukan syari'ah untuk menjamin realisasi *maqashid*.

### **Langkah Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

Dari empat elemen-elemen strategis yang telah diuraikan di atas, selanjutnya perlu adanya kebijakan-kebijakan dari sebuah negara untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan. Oleh karena itu, Chapra menawarkan lima dimensi kebijakan berikut: (a) menghidupkan faktor kemanusiaan; (b) mengurangi konsentrasi kekayaan; (c) melakukan restrukturisasi ekonomi; (d) melakukan restrukturisasi keuangan; dan (e) rencana kebijakan strategis.<sup>42</sup>

Di antara kebijakan-kebijakan strategis ini penekanannya adalah dimensi moral yang dimasukkan ke dalam barometer pembangunan material. Karena,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

menurutnya, pembangunan tanpa sebuah integrasi moral dan material akan sulit mewujudkan efisiensi dan pemerataan.<sup>43</sup> Berikut peneliti uraikan kelima dimensi tersebut:

### **Menghidupkan Faktor Kemanusiaan**

Untuk merealisasikan *maqashid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk memotivasi ke arah tersebut diperlukan injeksi moral ke dalam nafsu pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.

Untuk menegakkan nilai-nilai moral ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan motivasi verbal, lebih dari itu perbaikan-perbaikan yang realistis dan memegang peranan penting dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu:<sup>44</sup>

*Pertama*, keadilan sosio-ekonomi. Kebijakan-kebijakan harus berorientasi keadilan sosio-ekonomi. Konsentrasi kekayaan harus dikurangi sedemikian rupa hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi.

*Kedua*, transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.<sup>45</sup> Hal yang tepat untuk mempercepat transformasi ini ialah penggunaan lembaga-lembaga yang efektif dan media massa untuk melakukan perubahan sosial dan mereduksi nilai-nilai yang tidak Islami.

Meskipun keadilan sosio-ekonomi, kesadaran moral dan iklim sosial sangat diperlukan untuk memotivasi nilai-nilai kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini

---

<sup>43</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993, hlm. 70-71.

<sup>44</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 252.

<sup>45</sup> Berkaitan dengan pembentukan individu sebagai pelaku pembangunan ekonomi, Khurshid Ahmad menetapkan empat premis: (1) perubahan sosial bukanlah akibat dari kekuatan historis yang diterapkan sebelumnya; (2) manusia adalah faktor aktif dalam perubahan. Semua kekuatan lainnya berada di bawah kekuasaannya selama ia merupakan khalifah Allah di dunia; (3) perubahan terletak pada perubahan lingkungan dan perubahan hati dan jiwa manusia; (4) kehidupan merupakan jaringan antarhubungan; "Pengembangan Perekonomian Islam," dalam buku Khurshid Ahmad, ed., *Islamic Perspectives*, Leicester: Islamic Foundation, 1979, hlm. 231.

dapat ditempuh lewat pendidikan dan latihan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu juga adanya penciptaan kemudahan akses terhadap keuangan bagi kaum lemah dan pengusaha-pengusaha berskala besar, sehingga pemusatan kekayaan tidak lagi menjadi masalah yang menghambat pemerataan.<sup>46</sup>

### Mengurangi Konsentrasi Kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dikendalikan agar tercipta pemerataan yang berkeadilan, sebagaimana firman Allah:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر / ٥٩: ٧)

*“Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”* (QS. Al-Hasyr/59: 7)

*Pertama*, mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan syari’at. Untuk mereformasi pertanahan (*land reform*) perlu adanya batasan-batasan kepemilikan yang jelas dan aturan aturan penyewaan untuk menciptakan demokrasi dan egalitarian yang diidam-idamkan Islam. Selain reformasi tanah harus ada pula upaya penghapusan kelemahan-kelemahan yang diderita oleh sektor pertanian. Menyediakan pembiayaan yang memadai, bukan saja pada pertanian, tetapi juga industri-industri kecil yang ada di pedesaan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.

*Kedua*, mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di pedesaan atau di perkotaan. Tindakan ini akan melengkapi reformasi pertanahan dalam mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlangsung di negara-negara Islam. Hal ini juga mempunyai keuntungan lain yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islam.

*Ketiga*, kepemilikan yang lebih merata dan kontrol dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan

---

<sup>46</sup> Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 71-72.



terhadap kepemilikan saham yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini berakibat pada pemenuhan kepentingan diri sendiri.

*Keempat*, adanya restrukturisasi sistem keuangan berbasis bunga ke dalam sistem keuangan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem bunga, bagaimanapun juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi dalam dunia kapitalis. Sistem ini harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

### **Melakukan Restrukturisasi Ekonomi**

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa suatu adanya penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.<sup>47</sup>

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup vital, karena konsumsi merupakan salah satu kegiatan utama dalam perekonomian, oleh karena itu kesalahan pandangan dalam konsumsi akan berakibat fatal terhadap kondisi makro ekonomi. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian pola konsumsi, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menciptakan pemerataan dan efisiensi harus ada perbedaan antara yang penting dan yang tidak penting, antara kebutuhan, kemewahan, perantara (*intermediat*).<sup>48</sup> Dalam nilai-nilai Islam yang diutamakan adalah kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan lainnya adalah turunannya. Turunan tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan berorientasi pada keadilan sosio-ekonomi.

Dalam bidang keuangan publik, harus terdapat disiplin-disiplin tertentu agar tidak terjadi ke-*mubadzir*-an. Pemerintah harus melakukan prioritas-prioritas yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Semua pengeluaran pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan tabungan dengan cara menghapus segala macam korupsi dan kemubadziran, memberikan subsidi atas dasar persamaan yang terkontrol, dan mengurangi biaya pertahanan yang tidak wajar. Selain meningkatkan tabungan pemerintah juga dituntut untuk melakukan mekanisme perpajakan yang berpegang pada keadilan. Keadilan ini dapat terealisasi dengan berorientasi pada

---

<sup>47</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 279.

<sup>48</sup> Berkaitan dengan *consumer behaviour* di atas, M. Fahim Khan menguraikan secara komprehensif dalam "Macro Consumption Function in an Islamic Framework", dalam Masudul Alam Chudhury, *Contribution To Islamic Economic Theory; A Study in Sosial Economic*, New York: St. Martin's Press, 1986, hlm. 140-165.

kesejahteraan dan tidak terlalu mengikat. Sesuai dengan kemampuan masyarakat.<sup>49</sup>

Untuk menciptakan iklim sosio-ekonomi yang baik perlu juga adanya formasi kapital yang mendukung dengan memperbaiki iklim investasi yang kondusif serta menghapuskan hambatanya. Ini adalah upaya untuk mendorong laju pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan iklim investasi yang baik tentunya harus didukung oleh pembangunan infra struktur sosial dan fisik. Sistem perpajakan yang adil, stabilitas politik, menekan depresiasi kurs yang terus menerus, dan sejumlah kontrol yang mendukung bagi terciptanya kondisi tersebut.

Restrukturisasi sistem ekonomi ini akan meningkatkan volume investasi. Agar investasi itu tersalurkan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat.<sup>50</sup> Investasi harus membiayai produksi-produksi yang benar-benar dibutuhkan, bukan produksi barang-barang mewah yang hanya sebagai simbol prestise si kaya dan tidak mempunyai implikasi positif terhadap penciptaan kondisi sosio-ekonomi yang merata dan efisien.<sup>51</sup>

### **Melakukan Restrukturisasi Finansial**

Tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya. Investasi dan tabungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan harus memberikan prioritas pada pengembangan tersebut. Deposito-deposito atau tabungan harus di arahkan pembiayaannya pada sektor-sektor riil perekonomian. Deposito itu berasal dari masyarakat, maka rasional jika disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>52</sup>

Untuk mengarahkan sistem finansial, harus ada nilai-nilai yang mendasarinya yang mempunyai orientasi kesejahteraan seluruh umat manusia. Islam, dalam hal ini telah menyediakan sistem yang dimaksud. Oleh karena itu perombakan sistem finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam mutlak diperlukan. Bank-bank konvensional sebagai pengelola dana masyarakat, harus diarahkan dengan prinsip-prinsip yang lebih manusiawi, ia harus melepaskan sistem bunga

---

<sup>49</sup> Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hlm. 285-296.

<sup>50</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut, 2000, hlm. 48.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 303 dan 309-310.

<sup>52</sup> Chapra, *Islam and Economic Development*, hlm. 109.

yang terbukti tidak mampu menciptakan pemerataan, tapi hanya menghadiahkan pemenang-pemenang bagi segelintir orang.

Selain menghapus bunga dalam keuangan, bank-bank harus mempunyai orientasi pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) bukan pada industri-industri besar. UKM bagaimanapun, mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan membiayai UKM ini akan dapat mengurangi ketidakmerataan, konsentrasi kekayaan, dan konsentrasi kekuasaan.

### **Perencanaan Kebijakan Strategis**

Perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan kesenjangan antara mikro dan makro ekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi-institusi yang perlu didirikan atau reformasi untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan, serta mewujudkan suatu pemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber yang besar. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perbankan sesuai dengan ajaran Islam, yang akan menuntut perhatian khusus perencanaan. Juga tidak kalah pentingnya adalah reformasi secara sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil dan produktif. Ringkasnya, rencana ini tidak boleh hanya memusatkan kepada satu langkah saja atau bersandar kepada kontrol yang tidak semestinya, tapi ia harus menggunakan seluruh kebijakan dan berkesinambungan untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini harus merefleksikan suatu perubahan yang jelas dan dapat dimengerti dalam filsafat dan strategi pembangunan. Semua kebijakan – fiskal, moneter, pendapatan, impor dan produksi– harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini.<sup>53</sup>

Sebagai akhir dari uraian ini, ada sebuah pertanyaan yang menurut penulis cukup menggelitik: bagaimana hubungan antara ekonomi Islam untuk masyarakat Indonesia yang telah memiliki dasar negara Pancasila? Jawabannya akan banyak bergantung pada penafsiran kita sendiri tentang apa sesungguhnya Pancasila itu? Salah satu yang dapat kita garis-bawahi adalah kenyataan bahwa Pancasila sendiri masih memerlukan isi untuk menjadikannya benar-benar fungsional sebagai nilai-nilai kebudayaan bangsa kita. Pancasila adalah rumusan falsafah negara yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, tetapi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

bukan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Pancasila adalah nama, sebutan untuk merangkum keseluruhan nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa kita. Sedangkan dalam kesempatan ini, penulis sedang membahas tentang substansi nilai, bukan sebutan formalnya. Pancasila bukan agama dan agama bukan pancasila. Pancasila jangan diagamakan dan agama jangan dipancasilakan. Pernyataan retorik ini menuntut kita agar nilai-nilai sistem ekonomi Islam terhindar dari pencampuradukan yang tidak pada tempatnya dengan falsafah ekonomi lainnya. Dan pernyataan retorik ini akan menghapus ambivalensi intelektual yang mengaburkan pandangan tentang tatanan ekonomi Islam.

### **Telaah Kritis Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra**

Pemikiran Chapra dalam ekonomi Islam merupakan suatu pemikiran yang cerdas dan akademis. Ia mengidentifikasi masalah ekonomi dengan teliti dan jelas. Ia juga melakukan kritik-kritik terhadap sistem ekonomi yang kini sedang mendominasi dunia dengan berpijak kepada kegagalan-kegagalannya dalam menciptakan tatanan sosioekonomi yang berkeadilan, pada saat yang sama ia juga mengetengahkan suatu solusi yang diambil dari nilai-nilai Islam, sehingga kritiknya bukan sekedar sikap apatis yang tidak berdasar dan berlebihan, namun suatu analisis untuk mencari formulasi baru yang lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Dalam usaha pengembangan ekonomi Islam ia menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan resitatif. Ia memasukkan nilai-nilai Islam dalam aspek ekonomi. Bahkan lebih dari itu ia menekankan pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bernegara sebagai syarat dari terciptanya tatanan ekonomi yang efisien, merata dan berkeadilan. *Kedua*, pendekatan adaptif. Dalam beberapa hal ia cenderung menerima sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan negara kesejahteraan selam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia mencoba mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem tersebut dan mencari solusi dengan memasukkan nilai-nilai Islam.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nienhaus, sebagaimana dikutip oleh M. Dawam Raharjo, mengidentifikasi empat pendekatan tipikal dalam pengembangan ekonomi Islam. *Pertama*, pendekatan pragmatis. Pendekatan ini diwujudkan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program praktis di tingkat Internasional dalam bentuk kerja sama ekonomi dan integrasi ekonomi. *Kedua*, pendekatan resitatif. Terwujud dalam penerapan hukum fikih dan etika Islam dalam ekonomi. *Ketiga*, pendekatan utopian. Terwujud dalam perumusan masyarakat ideal dan model manusia yang pada dasarnya *altruistic*. *Keempat*, pendekatan adaptif. Terwujud dengan melihat ideologi barat yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Lihat, M. Dawam Raharjo, *Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1992, hlm. 13-14.

Dengan pendekatan semacam ini, maka ada titik-titik kelemahan, yang disadari atau tidak, dapat mempengaruhi tujuan-tujuan universal Islam itu sendiri. Pendekatan resitatif dalam pengembangan ekonomi misalnya, ia menekankan adanya sebuah tatanan sosial yang berdasarkan syariah Islam. Hal ini terkesan bahwa ia mendambakan negara Islam. Jika demikian halnya, pertanyaan yang mendasar kemudian adalah bisakah konsep-konsep yang ditawarkan olehnya diterapkan dalam masyarakat plural, masyarakat yang multi agama seperti Indonesia? Dan mampukah mewujudkan tujuan-tujuan Islam yang *rahmatan lil alamin*, dalam menciptakan kesejahteraan universal bagi seluruh manusia sedangkan konsep yang diusung tidak memberikan jaminan diterimanya konsep tersebut oleh semua golongan dan semua agama.

Dalam pendekatan kedua, di mana ia cenderung afirmatif dalam beberapa hal terhadap sistem ekonomi dunia, yang menurutnya sendiri telah mengalami kegagalan, memberikan kesan paradok dalam pemikirannya sendiri. Sehingga tak heran bila ada anggapan bahwa konsep ekonomi Islam yang dibawanya tak lebih hanyalah konsep kapitalisme yang dibungkus dengan Islam.<sup>55</sup> Terlepas benar tidaknya tuduhan tersebut, sikap afirmatifnya terhadap sistem ekonomi Barat ini dapat dilihat lewat penerimaannya terhadap filter harga yang dipakai oleh sistem pasar atau kapitalisme, ia hanya menambahkan satu filter lagi sebagai penyeimbangannya, yaitu filter moral.

Dalam menganalisis masalah-masalah ekonomi, Chapra banyak merujuk –untuk tidak mengatakan terpengaruh– pemikir-pemikir Islam klasik. Seperti dalam bukunya, *Islam and the Economic Challenge*, ia menekankan reformasi politik untuk mengadakan perubahan. Konsep ini dirujuknya dari pemikiran Hasan al-Banna. Kemudian konsep tentang pentingnya penegakan hukum Islam dalam sebuah negara untuk menciptakan kesejahteraan umat, konsep ini ditariknya dari konsep pembangunannya Ibnu Khaldun. Hal ini diakuinya secara eksplisit dalam buku terakhirnya, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*.<sup>56</sup> Walaupun ia banyak mengambil pemikiran-pemikiran muslim klasik, hal ini bukan berarti pemikirannya tidak original, justru hal ini merupakan tindakan kreatif untuk menggali nilai-nilai Islam.

Terlepas dari itu semua, pemikiran Chapra bagaimanapun telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya

---

<sup>55</sup> Ungkapan ini banyak ditudingkan kepada Chapra pada periode tahun 1970-an. Sebagaimana diungkapkan oleh Zafar Ishaq Anshari dalam prakata buku M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan ekonomi*, hlm. Xvii.

<sup>56</sup> Komentari ini disampaikan oleh Adiwarmanto A. Karim dalam sekapur sirih karya M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, hlm. Xvii.

pembangunan ekonomi berbasis Islam. Usaha-usahanya untuk membunikan ekonomi Islam telah dilakukannya dengan baik dan akademis dengan didukung oleh pengetahuan dan pengamalannya dalam bidang ekonomi kontemporer. Pelayanannya yang cukup mendalam terhadap kajian Islam umumnya, dan ekonomi Islam khususnya patut diapresiasi, maka tidak heran ketika ia menerima beberapa penghargaan dari berbagai pihak atas kerja kerasnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Chapra mempunyai arti yang sangat penting dalam khazanah studi keislaman pada umumnya, dan studi ekonomi Islam khususnya.

Meski tidak semuanya sependapat, banyak kalangan menyambut positif gagasan Chapra dalam mengetengahkan ekonomi Islam dalam perspektif “ekonomi konvensional”. Ekonomi Islam oleh Chapra tidak hanya disajikan secara parsial atau sekedar ungkapan “yang penting bukan riba”. Tapi lebih komprehensif dan menggunakan pijakan ilmu ekonomi, sehingga mereka yang sudah akrab dengan istilah ekonomi pun bisa tetap mengikutinya. Chapra secara obyektif menyajikan ekonomi Islam dalam konteks yang lebih kontemporer dengan mengupas hal mendasar tentang ekonomi. Pemahamannya atas ekonomi kontemporer beserta permasalahannya, menyeluruh dan tajam. Kritiknya terhadap sistem Barat terasa berimbang dengan data dan fakta yang akurat dan meyakinkan. Konsep dan gagasan ekonomi Islam di tangannya menjadi ilmiah tetapi tetap sederhana. Sehingga karya-karyanya tidak sekedar berbicara tentang teori, tetapi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan; bukan hanya bagi dunia Islam, tetapi seluruh dunia. Karya-karyanya bermanfaat menjadi katalisator untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi dunia Islam masa kini.<sup>57</sup>

Sikap profesional Chapra ditunjukkan dengan sikapnya yang tidak keberatan untuk mengakui kelebihan atau prestasi konsep ekonomi lain, sembari menganalisa kegagalan-kegagalan mereka tanpa berlebihan. Apalagi pada saat yang sama mengungkapkan alternatif dari konsep Islam secara akurat tanpa apologi atau pemihakan. Menurutnya, bicara masalah ekonomi tidak hanya soal pertumbuhan, kemakmuran dan konsumsi, tetapi juga menciptakan sebuah masyarakat di mana kemakmuran material juga diiringi oleh kemajuan sepiritual. Chapra membuktikan bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui kepemilikan materi semata. Dengan menggunakan pisau analisis ekonomi dengan efektif sebagaimana dilakukan oleh seorang ekonom Barat, Chapra berperan besar membangun bangunan baru bagi ilmu ekonomi yang tidak

---

<sup>57</sup> Mohammad Zaki Su'aidi, “Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam”, dalam Jurnal *Isbraqi*, Vol. 10 No. 1 Juni 2012, hlm. 12.

terlepas dari landasan moralnya, dan memberi tempat bagi usaha ekonomi agar dapat berlangsung dalam kerangka alokasi secara efisien dan distribusi berimbang secara bersama-sama, tidak saja untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi konsep atau pemikiran M. Umer Chapra mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi menurut ajaran Islam, yang tertuang dalam karya-karyanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada data kepustakaan. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian literer yang berdasarkan pada kerangka ilmiah kualitatif, yakni suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari data-data yang terkumpul.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi obyektif kehidupan Chapra, karena sebagaimana diketahui lahirnya sebuah pemikiran tidak terlepas dari kondisi obyektif yang dihadapi. Untuk mengetahui riwayat hidup Chapra, peneliti mengambil data-data kepustakaan, baik hasil penelitian ataupun penjelasan tokoh-tokoh yang memberikan komentar tentangnya.

### **Penutup**

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan. Dengan bersandar kepada nilai-nilai Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Dan tujuan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia.

Untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, M. Umer Chapra menawarkan adanya rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu adanya mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, adanya restrukturisasi sosioekonomi, dan peran negara yang aktif dalam ekonomi, bukan peran totaliter, namun peran yang komplementer dalam ekonomi. Untuk merealisasikan itu semua ia menawarkan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh. *Pertama*, menghidupkan faktor kemanusiaan. *Kedua*, mengurangi konsentrasi kekayaan. *Ketiga*, melakukan restrukturisasi ekonomi. *Keempat*, melakukan restrukturisasi keuangan. Dan *kelima*, melakukan rencana kebijakan strategis yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh

manusia. Inti dari seluruh tawarannya tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan moral mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Tawaran pembangunan ekonomi M. Umer Chapra memberikan langkah-langkah yang cukup aplikatif untuk pembuatan kebijakan ekonomi, bukan sekedar tawaran yang bersifat normatif untuk membumikan ekonomi Islam. Upaya mempertemukan gagasan-gagasan Islam dengan ekonomi kontemporer menjadikan tawarannya suatu hal yang unik dan kreatif. Kecermatan analisisnya terhadap elemen-elemen dan kebijakan-kebijakan strategis menandakan keseriusannya dalam upaya penerapan nilai-nilai Islam dalam suatu sistem ekonomi. Meskipun demikian, tawarannya ini masih dianggap, oleh beberapa kalangan, masih berbau kapitalisme karena sikapnya yang cenderung afirmatif terhadap sistem ekonomi Barat. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, upaya M. Umer Chapra patut dihargai sebagai upaya akademis dalam rangka membumikan ekonomi Islam.



### **Daftar Pustaka**

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti, dkk., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Ahmad, Khurshid, ed., *Islamic Perspectives*, Leicester: Islamic Foundation, 1979.
- , dalam pengantar karya M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Boullata, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Capra, Fritjof *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.
- Chapra, M. Umer, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993
- , *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut, 2000.
- , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- , *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- , *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2000.
- Chuodhury, Masudul Alam, *Contribution To Islamic Economic Theory; A Study in Sosial Economic*, New York: St. Martin's Press, 1986.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Fadllan, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Fakih, Mansour *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pengelolaan Ideologi LSM Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Kairo: Ali Subaih, 1982.
- Heilbroner, Robert L., *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terj. Sutan Diajung, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Howard, Roy J. *Pengantar Atas Teori-Teori Pemahaman Kontemporer: Hermeneutika, Wacana Analitik, Psikososial, dan Ontologis*, terj. Kusmana dan M.S. Nasrullah, Bandung: Nuansa Cendikia, 2000.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469.
- Raharjo, M. Dawam, *Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- , "Sekapur Sirih", dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Roxborough, Ian, *Teori-teori Keterbelakangan*, terj. Rohman Achwan, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Soediyono R, *Ekonomi Internasional; Pengantar Lalu-Lintas Pembayaran Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholish, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Kanaisius, 1999.
- Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah; Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010
- Syâtîbî, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 2000
- , *al-Muwâfaqat fî Ushul al-Abkam*, Jilid 2, Kairo: Mustafa Muhammad, 1984.
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Su'aidi, Mohammad Zaki, "Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10 No. 1 Juni 2012.
- "Pembinaan Manusia Jadi Prioritas", *Majalah Sabili*, 94 April 2002.